

# MEWUJUDKAN SEMANGAT BELA NEGARA DI BIDANG MARITIM DEMI MENYONGSONG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

**Bambang Puja Kusuma**

Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-61 TA 2023

Email: pujakusuma82@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.132>

## Abstrak

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,” adalah amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini termaktub di Pasal 27 ayat 3. Berdasarkan hal ini, setiap warga negara dapat memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan bela negara. Secara undang-undang, kewajiban utama bela negara di negara ini ada di pundak Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku komponen utama dan di *support* oleh masyarakat sipil secara umum dalam suatu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah harga yang tidak bisa ditawar, dan menjadi visi pemerintah RI saat ini. Demi mewujudkannya, semangat bela negara di bidang maritim adalah salah satu hal fundamental yang harus dijiwai seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci :** Semangat, Bela Negara, Poros Maritim Dunia

## Abstract

*"Every citizen has the right and obligation to participate in state defense efforts," is the mandate of the 1945 Constitution. This is stated in Article 27 paragraph 3. Based on this, every citizen can have a role in carrying out state defense activities. By law, the main obligation to defend the state in this country rests on the shoulders of the Indonesian National Armed Forces (TNI) as the main component and is supported by civil society in general in a system of defense and security for the entire people. Indonesia as the World Maritime Axis is a non-negotiable price, and is the current vision of the Indonesian government. In order to make it happen, the spirit of defending the country in the maritime field is one of the fundamental things that must be imbued with all levels of Indonesian society.*

**Keywords:** Spirit, State Defense, World Maritime Axis

## PENDAHULUAN

Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, adalah kerangka utama kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo. Hal ini sejak awal ditegaskan beliau di pidato

pertamanya usai pelantikan presiden pada periode kepemimpinan pertama. ***‘Kita telah terlalu lama memungguni laut, memungguni samudra, memungguni selat dan teluk’ ... ‘sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak***

***semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya,'***  
**Presiden RI Ir. Joko Widodo.**

Pada amanahnya, Presiden berkeinginan mengajak seluruh elemen bangsa kembali pada kita **Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim.** Dengan presiden sebagai pemimpinnya bersama restu serta ridha dari Tuhan YME (Presiden RI, 2014). Hal ini merupakan buah pemikiran luhur Presiden yang diterjemahkan dengan penuh kesadaran untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sekedar negara kepulauan belaka, melainkan sebagai Negara Maritim yang jaya.

Konstelasi global saat ini, disinyalir telah terjadi pergeseran kekuatan dari dunia Barat, menuju Asia (Jokowi,2014). Penganangan Poros Maritim Dunia, dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah upaya sungguh-sungguh Presiden menyambut konstelasi ini. Secara esensial, Presiden ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan akan mampu mengambil manfaat dengan cara melakukan arah pembangunan berbasis Maritim. Pembangunan maritim yang akan menempatkan Indonesia sebagai titik sentral dinamika hubungan di Asia dan Pasifik.

Membangun Budaya suatu bangsa berarti membentuk pola pikir, sikap dan prilaku sebuah bangsa. Bangsa Maritim,

menurut Dimiyati Hartono (seorang pakar hukum laut) maknanya adalah negara yang bertumpu pada kekuatan maritim dengan landas politik, ekonomi, sosbud, pertahanan, keamanan dan hukum sebagai penopang, untuk mewujudkan eksistensi, kebesaran dan kejayaannya (Setiadi,2012). Bangsa yang berbudaya maritim, adalah bangsa yang memiliki visi dan cara pandang terhadap seluruh aspek kebangsaan pada wawasan maritim demi mewujudkan eksistensi, kebesaran dan kejayaannya.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dengan Semangat Bela Negara di Bidang Maritim akan membangun Budaya Maritim demi menyongsong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

## **LANDASAN TEORI**

**Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.** Wawasan Nusantara adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa Indonesia. Maka, mewujudkan semangat Bela Negara di bidang maritim harus berlandaskan pada Wawasan Nusantara. Berbagai macam pertimbangan langkah

strategis yang akan ditempuh hendaknya tetap berpedoman pada geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia (Lemhanas, 2011).

**Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.** Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang memiliki tingkat ketangguhan dan keuletan dalam mengembangkan dan memobilisasi kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan integritas dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Lemhanas, 2011).

**Landasan Konseptual.** Doni Munardo saat menjadi Sekjen Wantanas menegaskan **Aksi Nasional Bela Negara**, tidak melulu dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi, kegiatan ini diwujudkan dalam tataran aksi implementatif di dalam program kerja masing-masing lembaga yang tersebut di atas dengan ruang lingkup yang holistik bagi seluruh elemen bangsa, demi mengantisipasi ancaman multi dimensional dalam kehidupan bernegara. Karenanya, Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional dalam mewujudkan semangat Bela Negara di bidang Maritim (Wantanas, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Secara deskriptif, naskah ini berupaya menelisik lewat literatur terkait

semangat bela negara demi visi Presiden mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, termasuk didalamnya hal yang menyebabkan budaya yang tidak berbasis maritim. Dari hasil telisik penulis melakukan analisis dengan mencoba menyajikan faktor penyebab semangat Bela Negara di bidang maritim belum membumi di Indonesia. untuk di ambil langkah lanjut mengatasinya.

Berdasarkan hal ini, metodologi yang dilakukan dalam penulisan naskah ini adalah deskripsi analisis.

## **PEMBAHASAN**

Dengan visi – misi pemerintah saat ini, mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, upaya Bela Negara di bidang Maritim adalah salah satu hal konkrit yang harus sama-sama diwujudkan oleh seluruh elemen bangsa. TNI-AL selaku komponen utama Bela Negara di matra laut dengan basis ke-maritim-an, adalah salah satu penjurunya.

Terkait hal ini, Laksamana TNI Muhammad Ali selaku Kepala Staf TNI-AL (KSAL) menegaskan, “TNI-AL harus memiliki kesiapan dan kesiagaan yang tinggi dengan ditopang kekuatan Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara,” (disampaikan pada *entry briefing* KSAL pada seluruh jajaran TNI-AL pada hari jum’at, 30 Desember 2022).

Cita luhur TNI-AL ini harus menjadi ilham bagi seluruh komponen pendukung negeri ini agar semangat bela negara di bidang maritim dapat kembali membumi di NKRI, semangat yang pernah pudar dalam budaya anak bangsa dimasa pemerintahan sebelumnya. Dan, semangat ini dapat diwujudkan melalui perkuatan sumber daya laut; infrastruktur; konektivitas maritim; diplomasi maritim serta pertahanan maritim (PPAL, 2017. Menurut Amien Widodo (Kepala Pusat Studi Kebumihan, Bencana dan Perubahan Iklim (PSKBPI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Institut Teknologi Surabaya (LPPM-ITS), Untuk membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia harus membangun Budaya Maritim (Widodo, 2018). Budaya yang akan membangkitkan semangat Bela Negara di Bidang Maritim agar harapan Presiden Joko Widodo dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan semangat bela negara di bidang maritim demi menyongsong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, penulis mengidentifikasi masalah antara lain; Hilangnya Budaya Maritim akibat pemaksaan Kultur budaya Kontinental pada masa Kolonial Belanda; Membangun Budaya yang terpola adalah melalui pendidikan. Sementara sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kurikulum pendidikan belum ber-Wawasan Bahari; Masyarakat Pesisir pantai dan komponen maritim lain, seharusnya menjadi

komponen pendukung TNI-AL pada konsep bela negara di bidang maritim.

#### **a. Kultur Budaya Kontinental yang Dipaksakan kepada Bangsa Indonesia oleh Pemerintah Kolonial.**

Jati diri Bangsa Indonesia adalah Bangsa Maritim. Bangsa Maritim yang mampu menunjukkan eksistensinya hingga menguasai berbagai Kawasan di Asia Tenggara. Dalam penjelajahan, jauh sebelum era Kolonialisme, Pelaut-pelaut Indonesia telah mengarungi Samudera hingga ke Madagaskar (Afrika Bagian Tenggara), meski secara arkeologis perlu diteliti lebih lanjut.

Kultur Budaya Maritim, membuat sebuah komunitas masyarakat menjadi petarung dan penjelajah dengan wawasan yang luas. Karena, laut azasi-nya bukan habitasi alami manusia. Menaklukan laut, membutuhkan semangat serta tekad kuat dari mereka yang melakukannya. Sejarah mencatat, Bangsa Indonesia adalah bagian dari mereka yang memiliki budaya ini.

Pada Awal abad-15, Bangsa-bangsa Eropa mengalami kesulitan memperoleh rempah-rempah akibat jatuhnya Konstantinopel ketangan Turki Usmani. Akibat monopoli Turki, menyebabkan melonjaknya harga rempah-rempah yang merupakan bahan pengawet utama daging ternak. Bangsa-bangsa Eropa kemudian tergerak untuk mencari jalur perdagangan

rempahnya sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan cengkeh.

Portugis, Spanyol dan Belanda, melakukan ekspedisi samudera ke Nusantara. Melihat begitu besarnya potensi kekayaan rempah-rempah Nusantara. Akhirnya timbul keinginan dari mereka untuk memonopolinya (Ricklef, 2007).

Belanda, tiba pertama kali di kepulauan Nusantara di Banten tahun 1596 dipimpin Cornelis De Houtman dengan kekuatan armada 6 buah kapal. Rombongan ini kemudian melakukan perjalanan menyusur utara Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Berhasil mengumpulkan rempah-rempah hingga memenuhi kapal-kapal mereka dan kembali ke Belanda pada tahun 1597 (Fitzsimons, 2012). Keberhasilan ekspedisi ini mendorong Belanda untuk menyusun ekspedisi yang lebih besar. 1598, dipimpin Jacob Van Neck, 22 kapal bertolak ke Nusantara. Mereka berhasil mencapai Maluku yang merupakan sentra penghasil Rempah-rempah. Melihat besarnya potensi ini, timbulah niat untuk melakukan monopoli sehingga lahirlah era Kolonialisme Belanda di Nusantara.

Hal ini mendapat perlawanan dari berbagai Kerajaan-kerajaan Nusantara yang sebelumnya mendapat manfaat dari jalur distribusi rempah-rempah. Nusantara-pun bergejolak, kekuatan kerajaan-kerajaan itu, lambat laun dapat dipadamkan oleh Kolonial

Belanda. Abad-6 adalah tonggak Kolonialisme berdiri. Dalam rangka menambah hasil bumi dan mencegah munculnya semangat bahari, Pemerintah kolonial kemudian menanamkan doktrin kedalam benak masyarakat pribumi, dimana lahan pertanian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi subsisten petani yang harus digarap sepanjang hayat.

Bangsa Indonesia sepanjang masa Kolonial hampir tidak pernah memikirkan sektor lain untuk membangun basis kekuatan diluar sektor pertanian. Budaya ini diwariskan hingga periode Kemerdekaan Indonesia. Hal ini bahkan terbawa hingga masa orde baru. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur, *gemah ripah loh jinawi*, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon.

Presiden Joko Widodo, meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang agraris, dalam hal ini kehutanan. Sadar akan kondisi ini, dan berupaya kembali membangkitkan kita Bangsa Indonesia sebagai bangsa Maritim.

#### **b. Kurikulum Pendidikan yang Belum Berwawasan Bahari Sebagai Bagian Fundamental Wawasan Nusantara.**

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya. Budaya agraris menjadi tema turun-temurun Bangsa Indonesia dan diterjemahkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru,

terutama, buku-buku pelajaran disekolah dari tingkat TK dan Sekolah Dasar hampir selalu menampilkan ilustrasi sapi sedang membajak sawah, pak tani sedang mencangkul tanah, Wati sedang berkebun, desaku yang permai dan sebagainya.

Pada waktu menginjak bangku SMP, pelajaran sejarah tingkat awal tidak lupa memberikan hafalan-hafalan diluar kepala tentang fase-fase perkembangan manusia pra-sejarah dari zaman batu, berburu, meramu, bercocok tanam hingga ladang pertanian berpindah. Pelajaran sejarah tentang masa kolonial pun, selalu mengeksploitasi periode tanam paksa pada masa pemerintah Hindia Belanda dengan memberikan gambaran-gambaran penderitaan penduduk pribumi akibat kebijakan tersebut, serta menerangkan dampak baik dari cultuurstelsel berupa pengenalan jenis-jenis tanaman produksi terhadap perkembangan sistem pertanian di Indonesia. Mata pelajaran Pertanian dimasukkan sebagai kurikulum tambahan disekolah-sekolah umum, hingga ditingkat Perguruan Tinggi pun hampir setiap Universitas membuka Fakultas-fakultas Pertanian dengan berbagai macam pilihan prodi. Berbanding terbalik dengan Fakultas Kelautan yang tidak selalu ada di level Universitas. Fakta-fakta tersebut cukup menjelaskan gambaran betapa sangat mendasarnya sektor pertanian dalam membangun setiap sendi kehidupan bangsa

Indonesia yang telah menjadi budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

### **c. Menumbuhkan budaya Maritim, terutama bagi Masyarakat Pesisir dan Seluruh Komponen Maritim demi Membangkitkan Semangat Bela Negara di Bidang Maritim.**

Budaya Agraris, merupakan Budaya turun-temurun beratus tahun dan telah mendarah daging di dalam sendi kehidupan masyarakat. Butuh kepedulian dan upaya yang sangat kuat serta menyeluruh dari seluruh pemangku kebijakan di Negeri ini.

Salah satu hal yang mempercepat proses perubahan budaya adalah ketegasan Pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menjadi pionir dengan ketegasannya. Seluruh aparturnya pun menyambut dengan membuat berbagai peraturan turunan untuk mengimplementasi ketegasan Presiden. Satya Lencana Wirakarya, adalah penghargaan yang disiapkan oleh Presiden bagi para kepala daerah yang mampu mengembangkan dan membangun laut di daerahnya.

Membangun Budaya Maritim bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara instan. Pemerintah RI saat ini, menyadari hal ini sehingga melaksanakannya dengan kolektif. Pemerintah sadar, Budaya Maritim merupakan *Soko Guruh*, dari Poros Maritim Dunia. dan, semangat Bela Negara berlandas Maritim akan menjadi salah satu

Tiang Pancang-nya. Regulasi telah disusun, maka implementasi yang sekarang perlu dilakukan.

Masyarakat Pesisir, yakni masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai; pulau-pulau kecil, yang peri kehidupannya berbasis laut bersama Komponen Maritim lain, seperti Kepolisian Perairan (Polair), lembaga-lembaga negara (Kementerian Keuangan-Bea Cukai, Kementerian Perhubungan-Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Keamanan Laut) dan Industri berbasis Maritim, harus terbina dalam satu kesatuan visi, pengemban amanah pendukung TNI-AL selaku komponen utama Bela Negara di sektor Pertahanan Laut.

#### **d. Langkah yang Dilaksanakan Dalam Rangka Menumbuhkan Semangat Bela Negara di Bidang Maritim.**

1) **Sosialisasi**, Elemen penanggung jawab di lapangan, harus melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat tentang besarnya Makna Laut bagi peri kehidupan Bangsa. Salah satu Langkah efektif di era digital saat ini adalah memanfaatkannya demi melakukan sosialisasi secara cepat dengan menyusun regulasi, pola, metode dan segera mengaplikasikan-nya.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) adalah pemangku utama hal ini. Dalam kerangka

prioritas pembangunan nasional, Kemenkominfo sebagai *focal point* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, didalamnya terkandung tujuan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kemenkominfo menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi harus di tambah demi menunjang visi Presiden. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 (Kemeninfo,2000).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan bahwa prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau *connecting the unconnected*, kemandirian, dan kedaulatan digital. Melalui berbagai program kerja yang telah disiapkan, Kemenkominfo akan hadir untuk memastikan hulu sampai ke hilir transformasi digital dapat mengalir. Mulai dari memastikan seluruh wilayah di Indonesia tersedia layanan seluler 4G, menciptakan ruang digital yang aman dan masyarakat tetap terlindungi, mendukung penciptaan *fair level of playing field* di sektor terkait, hingga mendorong digitalisasi terjadi di semua sektor. Semua upaya ini dilakukan

untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju!

Melalui koneksitas ini, sosialisasi atas Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan mempercepat proses transformasi Budaya dari Agraris menuju Budaya Maritim. Dengan budaya ini, maka Semangat Bela Negara di bidang Maritim akan tumbuh mengiringinya.

Sosialisasi lain dilaksanakan oleh setiap kementerian yang bergerak di bidang kementerian dengan memasukkan Poros Maritim Dunia sebagai bagian program kerja, utamanya yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

## 2) **Rancangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Maritim**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan pencaanangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah-langkah regulasi hingga implemtatif untuk mendukung.

Saat ini Poros Maritim Dunia telah masuk ke dalam Kurikulum Pendidikan di tingkat menengah di mata pelajaran Geografi (Kemendikbud, 2018). Pendidikan kebaharian pun sudah mulai diperkenalkan sejak usia dini. Hal ini adalah bukti upaya menyeluruh pemerintah untuk merubah Budaya anak bangsa.

Ini adalah salah satu upaya paling efektif melalui media pendidikan untuk

melakukan suatu pelurusan pemahaman. Generasi muda, mereka yang berusia di bawah 15 tahun adalah orang-orang yang masih dapat dibentuk cara pandang nya. Dengan masuknya Poros Maritim Dunia pada kurikulum, akan membentuk pola Budaya baru Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kemendikbud sendiri saat ini juga turut berperan serta aktif melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler kesiswaan mulai tingkat SMP dengan **Satuan Karya Pramuka Bahari** atau disingkat sebagai **Saka Bahari**. Saka Bahari sendiri adalah salah satu satuan karya pramuka skala Nasional. Bahari disini mengandung arti laut. Keberadaan Saka Bahari bertujuan Memperkenalkan kehidupan kebaharian bagi anggota Pramuka demi menumbuhkan semangat serta jiwa bahari mereka dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kebaharian yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat menjadi bekal dalam mengembangkan lapangan kerja. Pembinaan Saka Bahari dilaksanakan melalui kerjasama antara Pembina Gerakan Pramuka dengan TNI-AL.

## 3) **Pembinaan Ketahanan Wilayah Pertahanan Laut oleh TNI-AL.**

Pembinaan Potensi Maritim adalah bagian melekat dalam organisasi TNI-AL, dipimpin oleh seorang Laksamana berbintang dua selaku Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KSAL.



Staf Potensi Maritim (Spotmar) memiliki tugas menyelenggarakan fungsi TNI-AL di bidang Binpotmar yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan Potmar, pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, pembinaan bakti TNI-AL dan pembinaan perbatasan laut/pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) guna menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

Spotmar TNI-AL bertugas menyiapkan potensi Nasional. Ketika Negara membutuhkan, potensi ini dapat menjadi Kekuatan Pertahanan. Untuk itu, potensi ini harus dipersiapkan secara dini meliputi Wilayah Pertahanan dan Kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer. Untuk itu, Semangat Bela Negara di bidang Maritim harus dibangkitkan dan menjadi salah satu tugas Spotmar TNI-AL.

Dalam mewujudkan tugas ini, Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) TNI-AL selaku pelaksana teknis kebijakan Aspotmar membentuk Satuan Potensi Maritim secara berjenjang dari Tingkat tertinggi sampai dengan terbawah, pembentukan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar).

Babinpotmar adalah pelaksana terbawah kebijakan pembinaan potmar yang langsung berkontak dengan masyarakat. Babinpotmar dibekali pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan potensi maritim untuk kepentingan pertahanan negara, memiliki kemampuan bersosialisasi dan **memotivasi masyarakat dalam upaya bela negara**, memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam pembinaan potensi maritim dengan mengakomodasikan kepentingan pertahanan negara di lingkungan tugasnya dan memiliki kemampuan menyusun, mengumpulkan dan menyajikan data potensi maritim yang diperlukan oleh satuan untuk kepentingan pertahanan negara.

## PENUTUP

Mewujudkan Semangat Bela Negara di Bidang Maritim demi Menyongsong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia membutuhkan upaya menyeluruh dan terstruktur dari seluruh Aparatur Negara. Poros Maritim Dunia bukanlah slogan semata, namun telah menjadi visi dan misi Pemerintah RI. Salah satu komponen pendukungnya adalah Kuatnya Pertahanan Laut Nusantara. Dengan Semangat Bela Negara di Bidang Maritim yang membumi di seluruh komponen Maritim, maka Semangat Bela Negara di Bidang Maritim ini akan tumbuh berkembang menjadi budaya

sebagai salah satu pilar dari Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

## REFERENSI.

- Dewan Ketahanan Nasional (2018), Pembinaan Bela Negara, Dewan Ketahanan Nasional-Republik Indonesia, diakses tanggal 15 Januari 2023
- Direktorat Jendral Pendidikan SMA Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2018), Buku Ajar Geografi SMA
- Fitzsimons, Peter (2012), Batavia
- Kementrian Info dan Komunikasi (2000), Rencana Strategis 2020-2024, diakses 15 Januari 2023
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/ 2639/VII/2018 (2018), Doktrin Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.
- Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (2011), Kelompok Kerja Penjelasan Tentang Konsepsi Wawasan Nusantara, diakses 22 November 2022
- Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (2011), Modul Ketahanan Nasional, diakses 22 November 2022
- Mahan, Alfred Thayer (1980), The Influence of sea Power Upon History, 1660-1783, penerbit Little Brown
- Nur Azizah, Laeli (201), "Budaya: Ciri-ciri, Fungsi, Unsur dan Contohnya", Blog Gramedia, diakses 15 Januari 2023.
- Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (2017), Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju, diakses 15 Januari 2023
- Merle Calvin Ricklef, Merle Calvin (2007), Sejarah Indonesia Modern 1200–2004
- Setiadi, Agus (2021), Manajemen Perikanan Lait Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional, diakses tanggal 22 November 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kertas Negara.
- Widodo, Amien (2018), Budaya Maritim Nusantara, Forum Diskusi ITS, diakses melalui ITS news pada 4 Januari 2023.
- Widodo, Joko (2014), Pidato Kenegaraan Presiden Pertama tanggal 20 Oktober 2014
- Widodo, Joko (2014), Visi Pertahanan Prabowo Joko Widodo [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/06/140622](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140622), diakses 15 Januari 2013.